



UHAMKA PRESS

p-ISSN: 2477-3859 e-ISSN: 2477-3581  
**JURNAL INOVASI PENDIDIKAN DASAR**  
The Journal of Innovation in Elementary Education  
<http://jipd.uhamka.ac.id/index.php/jipd>



Volume 1 • Number 2 • June 2016 • 51 - 58

## Analisis Spasial Penyediaan Fasilitas Pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Boyolali

Ratih Puspita Dewi<sup>1</sup>, ✉

<sup>1</sup>Prodi PGSD, FKIP, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

Received: January 16, 2016

Revised: April 25, 2016

Accepted: May 15, 2016

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Persebaran, pola, dan jangkauan (2) Ketersediaan fasilitas pendidikan (3) Daya layan fasilitas pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Boyolali. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Populasi penelitian yaitu seluruh SMP di Kabupaten Boyolali tahun 2011, dengan teknik sampling menggunakan *stratified random sampling*. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi dan observasi lapangan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis peta dan analisis tetangga terdekat. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Distribusi SMP paling banyak terdapat di Kecamatan Boyolali, paling sedikit terdapat di Kecamatan Selo, pola persebaran pada topografi bergunung acak, pada topografi dataran rendah juga acak, dan sebesar 11.1% SMP mudah terjangkau, 81.1% cukup terjangkau, dan 7.7% SMP sulit terjangkau; (2) Kecukupan SMP tertinggi di Kecamatan Ampel, Kecamatan Boyolali, Kecamatan Sawit, Kecamatan Banyudono, Kecamatan Sambi, Kecamatan Simo, Kecamatan Karanggede, Kecamatan Klego, Kecamatan Andong, dan Kecamatan Wonosegoro, dan kecukupan terendah di Kecamatan Cepogo; (3) Kecamatan yang jumlah sekolahnya belum memenuhi kebutuhan yaitu: Selo, Cepogo, Musuk, Mojosongo, Teras, Ngemplak, Nogosari, Kemusu, dan Juwangi.

**Kata kunci:** Persebaran spasial, pola spasial, jangkauan, ketersediaan, daya layan

## *Spatial Analysis of Availabilty Educational Facilities at Junior High School in Boyolali District*

### Abstract

*The research aimed to know: (1) spatial distribution, distribution pattern and educational facilities reach, (2) the availability of educational facilities, (3) the function of availability of educational facilities at junior high school in Boyolali District. This research used descriptive research method. The population of the research is all junior high school in Boyolali District at 2011, the sampling technique is stratified random sampling. The technique of collecting data are documentation and observation. The technique of data analysis is map analysis and nearest neighbour analysis. The result shown: (1) junior high school spasioal distribution mostly located in Boyolali Subdistrict and the least in Selo Subdistrict, the distribution pattern at mountainous topography is random, in the lowland topography also random, and there are 11.1% junior high schools are easy to reach, 81.1% junior high schools are quite easy to reach, and 7.7% junior high schools are difficult to reach; (2) The highest junior high school adequate is in Ampel Subdistrict, Boyolali Subdistrict, Sawit Subdistrict, Banyudono Subdistrict, Sambi Subdistrict, Simo Subdistrict, Karanggede Subdistrict, Klego Subdistrict, Andong Subdistrict, and Wonosegoro Subdistrict, and the least junior high school adequate is in Cepogo Subdistrict; (3) The subdistrict which number of schools are not enough they are: Selo, Cepogo, Musuk, Ngemplak, Nogosari, Kemusu, and Juwangi.*

**Keywords:** *Spatial distribution, distribution pattern, range, availability, function of availability*

✉ *Corresponding Author:*

*Tel. 085725668211*

*E-mail. anyun\_me98@yahoo.com*

## **PENDAHULUAN**

Hak mendapat pelayanan pendidikan tanpa diskriminasi setiap warga negara Indonesia telah dijamin dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 5, artinya setiap warga negara Indonesia, dimana saja, harus memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan. Untuk menjamin pemerataan kesempatan pendidikan tersebut, maka pemerintah diantaranya harus mampu menyediakan fasilitas pendidikan yang dapat melayani kebutuhan seluruh penduduk dan tentunya bisa diakses dengan mudah oleh penduduk untuk memanfaatkannya.

Pada kenyataannya, kebutuhan akan sarana dan prasarana pendidikan tidak selalu terpenuhi dengan baik dikarenakan jumlah, luasan atau lokasi dari sarana dan prasarana pendidikan. Pada suatu daerah dapat dijumpai sarana dan prasarana pendidikan yang lengkap dengan tingkat pelayanan yang tinggi, sedangkan pada daerah lain ketersediaannya tidak memenuhi ketentuan, sehingga tingkat pelayanannya menjadi rendah. Kecenderungan tingkat perbedaan tingkat pelayanan pada umumnya terjadi antar daerah perkotaan dan pedesaan. Kota merupakan pusat dari segala pelayanan sarana dan prasarana pendidikan, sedangkan desa pada umumnya terabaikan, meskipun sebenarnya kebutuhan masyarakatnya sama hanya dengan jumlah yang berbeda. Adanya kecenderungan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan yang tidak memperhatikan kebutuhan juga merupakan salah satu sebab mengapa tingkat pelayanan menjadi tidak efektif. Penempatan fasilitas-fasilitas pendukung dalam memperbaiki kualitas hidup manusia khususnya di dalam penelitian ini adalah fasilitas pendidikan, dalam penyebarannya harus sesuai dengan jangkauan penduduk sebagai pengguna.

Hal ini tentunya berlaku untuk seluruh wilayah yang ada di negara ini salah satunya adalah Kabupaten Boyolali. Sebagai salah satu kabupaten di wilayah administrasi pemerintahan Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Boyolali memiliki kewajiban untuk meningkatkan kualitas masyarakat melalui pendidikan, maka penyediaan fasilitas pendidikan yang berkualitas dan merata dipandang sebagai suatu kewajiban mutlak yang harus dipenuhi pemerintah Kabupaten Boyolali. Pelayanan pendidikan yang baik tentunya harus didukung oleh penyediaan fasilitas pendidikan yang bisa menjangkau dan melayani seluruh penduduk dengan merata.

Masalah persebaran lokasi fasilitas pendidikan menjadi sangatlah penting untuk diperhatikan di Kabupaten Boyolali. Untuk itu maka diperlukan kajian mengenai persebaran lokasi fasilitas pendidikan yang diharapkan bisa menjadi salah satu acuan dalam peningkatan pelayanan pendidikan kepada masyarakat. Penyebaran lokasi fasilitas pendidikan erat hubungannya dengan perluasan kesempatan kepada masyarakat. Hambatan dalam memperoleh kesempatan belajar merupakan salah satu faktor yang dapat mengurangi hasrat mendapatkan pendidikan, disamping masalah sosial dan ekonomi. Sejalan dengan pertumbuhan penduduk yang pesat, beban tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan fasilitas pendidikan menjadi semakin besar. Pada tiap permukiman baik di perkotaan maupun pedesaan, pemerintah membangun fasilitas pendidikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan tingkatannya.

Penyediaan fasilitas pendidikan diantaranya dengan membangun sekolah mulai dari jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah hingga perguruan tinggi. Pendidikan dasar meliputi SD (Sekolah Dasar) dan MI (Madrasah Ibtidaiyah) atau bentuk lain yang sederajat serta SMP (Sekolah Menengah Pertama) dan MTs (Madrasah Tsanawiyah) atau bentuk lain yang sederajat. Pendidikan menengah meliputi SMA (Sekolah Menengah Pertama), MA (Madrasah Aliyah), SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) dan MAK (Madrasah Aliyah Kejuruan), atau bentuk lain yang sederajat. Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi.

Mengingat pendidikan sangat luas cakupannya maka dalam penelitian ini dibatasi pada pendidikan dasar khususnya SMP.

## METODE PENELITIAN

### Pengumpulan Data

Metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif. Objek penelitian adalah Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Boyolali dan dilaksanakan pada bulan Januari - Agustus 2011. Populasi penelitian ini adalah seluruh SMP yang ada di Kabupaten Boyolali. Teknik *sampling* yang digunakan adalah *stratified random sampling*. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumentasi berupa data alamat SMP, data jumlah SMP, jumlah guru, jumlah murid, jumlah kelas dan jumlah ruang kelas dan observasi berupa data lokasi absolut SMP, data aksesibilitas berupa jenis jalan dan angkutan umum, dan ketersediaan prasarana berdasarkan standar baku. Teknis analisis yang digunakan adalah analisis peta dan analisis tetangga terdekat.

### Analisis Data

Teknis analisis data meliputi (1) persebaran, pola, dan jangkauan fasilitas pendidikan; (2) Ketersediaan fasilitas pendidikan; dan (3) Daya layan fasilitas pendidikan. Analisis persebaran fasilitas pendidikan dengan menggunakan analisis peta. Peta digunakan sebagai media penyaji dalam menampilkan lokasi SMP yang disimbolkan dengan titik. Lokasi diperoleh dengan melakukan observasi langsung dengan menggunakan GPS (*Global Positioning System*). Pola persebaran fasilitas pendidikan parameter tetangga terdekat. Adapun rumus parameter tetangga terdekat (*nearest-neighbour statistic*) menurut Bintarto dan Hadisumarno (1979) sebagai berikut:

$$T = \frac{Ju}{Jh}$$

Keterangan;

$T$  = Indeks penyebaran tetangga-terdekat

$Ju$  = Jarak rata-rata yang diukur antara satu titik dengan titik tetangganya yang terdekat

$Jh$  = Jarak rata-rata yang diperoleh andaikata semua titik mempunyai pola random =  $\frac{1}{2\sqrt{p}}$

$p$  = Kepadatan titik dalam tiap kilometer persegi yaitu jumlah titik ( $N$ ) dibagi luas wilayah ( $A$ ).

Jangkauan SMP diketahui dengan menggunakan unsur aksesibilitas. Kaitannya dengan jangkauan SMP aksesibilitas dalam penelitian ini mencakup juga kemudahan untuk mencapai SMP. Ada beberapa unsur yang mempengaruhi tingkat aksesibilitas, misalnya kondisi jalan, jenis angkutan yang tersedia, frekuensi keberangkatan, dan jarak. Untuk menyederhanakan persoalan maka dilakukan modifikasi, unsur aksesibilitas yang digunakan adalah jarak, jalan, dan angkutan umum. Untuk mengukur tingkat aksesibilitas dilakukan dengan skoring dari masing-masing unsur aksesibilitas. Untuk jarak semakin dekat maka skornya semakin tinggi begitu pula sebaliknya, Untuk jalan diskor sesuai dengan jenis jalannya, dan angkutan meliputi roda dua, angkudes, dan minibus. Untuk membuat pedoman skor parameter aksesibilitas dilakukan dengan modifikasi dari pedoman skor oleh Sugiyanto (2004). Modifikasi dilakukan untuk membuat skor parameter aksesibilitas yang disesuaikan dengan kondisi lapangan, modifikasinya antara lain parameter aksesibilitas yang digunakan adalah parameter aksesibilitas oleh Robinson (2010) yang dimodifikasi, meliputi jarak, jalan, dan angkutan umum. Skor dari masing-

masing parameter diperoleh dengan melakukan modifikasi dari skoring. Lebih jelas modifikasi skor aksesibilitas dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Pedoman Skor Aksesibilitas Menuju SMP

Unsur Aksesibilitas	Kriteria	Skor
Jarak	0,001 km – 1,62 km	3
	1,63 km – 3,25 km	2
	3,26 km – 4,88 km	1
Jalan	Arteri	4
	Kolektor	3
	Lokal	2
	Lain	1
Angkutan menuju SMP	Minibus	3
	Angkudes	2
	Roda dua	1

Sumber: Modifikasi dari Robinson (2010) dan Sugiyanto (2004)

Ketersediaan fasilitas pendidikan dianalisis menggunakan analisis data sekunder berupa jumlah sekolah menengah pertama yang ada di Kabupaten Boyolali kemudian data tersebut dibandingkan dengan kebutuhan minimal sekolah untuk tiap penduduk tertentu, apakah ketersediaan fasilitas pendidikan tersebut cukup atau tidak cukup. Menurut Muta'ali (2000) kriteria penentuan baku fasilitas pendidikan untuk 1 SMP melayani 12.000 jiwa, apabila kriteria tersebut terpenuhi maka ketersediaan SMP dinyatakan cukup, sebaliknya apabila kriteria tersebut tidak terpenuhi maka ketersediaan SMP dinyatakan tidak cukup.

Daya layan fasilitas pendidikan dapat diketahui melalui rasio antara ketersediaan fasilitas yang ada dengan kebutuhan minimal fasilitas pendidikan. Kemudian dilakukan skoring untuk mengetahui klasifikasi daya layan fasilitas pendidikan. Rumus pengukuran variabel pelayanan menurut Muta'ali (2000) antara lain:

Rasio jumlah sekolah/sekolah minimal =  $\frac{\text{jumlah sekolah}}{\text{sekolah minimal}}$  dimana Sekolah minimal (SMP) = jumlah penduduk: 12.000 jiwa

Rasio Ruang Kelas/Ruang Kelas Minimal:  $\frac{\text{Ruang Kelas}}{\text{Ruang Minimal}}$  dimana Ruang kelas minimal (SMP) = jumlah sekolah x 6

Rasio Murid/Guru =  $\frac{\text{Murid}}{\text{Guru}}$

Rasio Murid/Kelas =  $\frac{\text{Murid}}{\text{Kelas}}$

Untuk mempermudah penyajiannya dalam peta, daya layan fasilitas pendidikan diklasifikasikan menjadi tiga kategori yaitu tinggi, sedang dan rendah. Daya layan diwujudkan dalam simbol bidang dan untuk membedakan tingkat daya layan setiap bidang diberi warna yang berbeda sesuai dengan kategori daya layannya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Persebaran, Pola, dan Jangkauan SMP di Kabupaten Boyolali.

Persebaran SMP yang ada di Kabupaten Boyolali diketahui dengan analisis spasial dengan menggunakan peta, sedangkan untuk pengambilan data lokasi SMP dengan menggunakan metode survey. Dalam penggambarannya di peta, SMP disimbolkan menggunakan titik (*point*) yang berarti satu titik pada peta menunjukkan satu SMP. Lokasi titik tersebut menggambarkan kedudukannya secara absolut di permukaan bumi. Lokasi absolut SMP di Kabupaten Boyolali diambil dengan menggunakan GPS (*Global Positioning System*).

Untuk membantu penyajian data persebaran SMP di Kabupaten Boyolali digunakan suatu sistem yang disebut Sistem Informasi Geografis (SIG) yang mengolah data atribut berupa titik lokasi SMP yang kemudian dimasukkan ke dalam peta dasar. Hasil akhir dari pengolahan data yang dilakukan menggunakan SIG berupa peta persebaran SMP di Kabupaten Boyolali. Penentuan jumlah titik berdasarkan jumlah populasi SMP yang ada di Kabupaten Boyolali. Jumlah SMP yang ada di kabupaten boyolali adalah 90 buah. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa persebaran SMP paling banyak di Kecamatan Boyolali dengan jumlah 10 SMP atau 11.1% dari jumlah seluruh SMP dengan jumlah penduduk 51.330 jiwa jumlah 10 SMP ketersediaannya melebihi dari kebutuhan minimal fasilitas pendidikan yang seharusnya ada, hal tersebut karena Kecamatan Boyolali terdapat di Ibukota Kabupaten Boyolali, sehingga Kecamatan Boyolali merupakan pusat dari segala kegiatan pemerintahan, ekonomi, dan pendidikan, sehingga daya tarik Kecamatan Boyolali dengan kecamatan lain berbeda selain itu kepadatan penduduknya menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan kecamatan lain yang letaknya jauh dari pusat Kabupaten Boyolali kepadatan penduduknya menjadi lebih rendah. Kenampakan persebaran SMP dipeta lebih rapat pada kecamatan yang dekat dengan pusat Kabupaten Boyolali sedangkan SMP yang letaknya jauh dari pusat Kabupaten Boyolali persebarannya lebih menyebar. Seperti persebaran SMP di Kecamatan Selo, Kecamatan Musuk, dan Kecamatan Cepogo persebarannya SMPnya pada peta lebih menyebar. Dilihat dari jumlah SMPnya, Pada Kecamatan Selo, Kecamatan Musuk, dan Kecamatan Cepogo mengalami kekurangan. untuk Kecamatan Ampel walaupun letaknya jauh dari pusat pemerintahan Kabupaten Boyolali namun persebaran SMPnya pada peta lebih rapat dan jumlahnya melebihi dari kebutuhan minimal yang dibutuhkan penduduk di Kecamatan Ampel dengan jumlah penduduk 68.781 jiwa ketersediaan SMPnya sebanyak 9 SMP atau 10 % dari seluruh jumlah SMP di Kabupaten Boyolali, hal tersebut karena Kecamatan Ampel terletak pada wilayah perbatasan dengan Kabupaten Semarang sehingga Kecamatan Ampel merupakan wilayah yang dilalui jalur antarkota kabupaten yang ramai, kegiatan perekonomian Kecamatan Ampel menjadi lebih tinggi daripada kecamatan lain. Persebaran SMP disajikan melalui peta persebaran SMP di Kabupaten Boyolali tahun 2011.

Pola persebaran SMP digunakan analisis tetangga terdekat (*nearest neighbor analysis*). Metode ini digunakan untuk mengetahui pola persebaran suatu obyek yang diasumsikan sebagai titik (*point*). SMP di Kabupaten Boyolali yang diasumsikan sebagai titik (*point*). Sebagai dasar dalam penghitungan indeks parameter tetangga terdekat dalam penelitian ini adalah peta pola persebaran SMP di Kabupaten Boyolali, Peta ini merupakan hasil analisis antara persebaran SMP di Kabupaten Boyolali dan perhitungan parameter tetangga terdekat. Untuk menghitung pola persebaran SMP, Kabupaten Boyolali dibagi menjadi dua yaitu Kecamatan yang terdapat pada topografi bergunung dan dataran rendah. Pembagian wilayah kecamatan bertujuan untuk menyeragamkan topografi masing-masing kecamatan. Berdasarkan hasil penghitungan dengan menggunakan analisis tetangga terdekat diketahui bahwa pola sebaran SMP pada topografi bergunung adalah pola persebaran acak (*random*). Pola sebaran SMP di topografi dataran rendah adalah pola persebaran mendekati acak (*random*). Pola persebaran SMP pada topografi bergunung dan topografi dataran rendah sama yaitu acak (*random*), hal tersebut dikarenakan letak SMP pada suatu daerah bergantung pada besar dan persebaran jumlah penduduk tertentu sehingga letaknya mengikuti persebaran dan jumlah penduduknya. Pada pusat pemerintahan kabupaten jumlah SMP lebih banyak karena dekat dengan pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan. Hal tersebut karena pada pusat pemerintahan kepadatan penduduknya lebih besar dibandingkan pada daerah yang jauh dari pusat pemerintahan. Pola persebaran SMP disajikan melalui peta pola persebaran SMP di Kabupaten Boyolali tahun 2011.

Jangkauan fasilitas pendidikan menggunakan analisis dari parameter aksesibilitas, jadi jangkauan SMP dilihat dari tingkat aksesibilitas menuju SMP. Parameter aksesibilitas yang digunakan adalah jarak, jalan, dan angkutan. Berdasarkan tiga parameter di atas ditentukan kelas aksesibilitasnya dengan cara menjumlahkan skor hasil pengamatan lapangan dari masing-masing parameter. Klasifikasi jangkauan SMP sebagai berikut: SMP yang termasuk dalam kategori mudah terjangkau terdapat 10 SMP SMP mudah terjangkau memiliki skor 9-10, faktor yang memudahkan jangkauan antara lain jaraknya dekat, transportasi mudah berada di jalan arteri dan dilewati oleh minibus. Penduduk disekitar SMP tidak mengalami hambatan yang berarti dalam mendatangi SMP khususnya dalam hal aksesibilitas. SMP cukup terjangkau SMP cukup terjangkau memiliki skor 6-8, dengan jarak SMP agak jauh dari jalan lokal namun masih dilewati oleh angkutan umum berupa minibus dan angkudes sehingga tidak ada hambatan yang berarti dalam mendatangi SMP. Terdapat 73 SMP cukup dijangkau. SMP sulit dijangkau memiliki skor 3-5, faktor yang mempengaruhi adalah jarak yang jauh dari jalan lokal, kesulitan transportasi karena tidak dilewati oleh angkutan umum, dan hanya ada kendaraan roda dua. terdapat 7 SMP sulit dijangkau. Penyajian jangkauan SMP di Kabupaten Boyolali disajikan melalui Peta Jangkauan SMP di Kabupaten Boyolali Tahun 2011.

### **Ketersediaan Fasilitas Pendidikan Pada Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Boyolali Tahun 2011**

Penyediaan Fasilitas pendidikan didasarkan atas besarnya jumlah penduduk. Lokasi fasilitas pendidikan dapat berdekatan satu sama lain karena didasarkan atas kebutuhan minimal pada jumlah penduduk tertentu bukan pada jarak tiap fasilitas pendidikan. Kategori sekolah di Kabupaten Boyolali dibagi menjadi 4 yaitu: SMP Negeri, SMP Swasta, SMP Satu Atap, dan SMPLB. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Tingkat Kecukupan Fasilitas SMP di Kabupaten Boyolali Tahun 2011

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Minimal Jumlah Fasilitas Pendidikan	Jumlah Fasilitas Pendidikan yang Tersedia	Jumlah Penduduk yang Tidak Terlayani	Tingkat Kecukupan
1.	Selo	26.845	3	2	2.845	Tidak Cukup
2.	Ampel	68.781	6	9	0	Cukup
3.	Cepogo	53.101	5	3	17.101	Tidak Cukup
4.	Musuk	60.328	5	4	12.328	Tidak Cukup
5.	Mojosongo	59.411	5	4	11.411	Tidak Cukup
6.	Boyolali	51.330	4	10	0	Cukup
7.	Teras	45.628	4	3	9.628	Tidak Cukup
8.	Sawit	32.996	3	3	0	Cukup
9.	Banyudono	45.194	4	4	0	Cukup
10.	Sambi	48.583	4	5	0	Cukup
11.	Ngemplak	70.861	6	5	10.861	Tidak Cukup
12.	Nogosari	60.524	5	4	12.524	Tidak Cukup
13.	Simo	43.633	4	4	0	Cukup
14.	Karanggede	40.570	4	4	0	Cukup
15.	Klego	45.907	4	5	0	Cukup
16.	Andong	61.924	5	7	0	Cukup
17.	Kemusu	46.310	4	3	10.310	Tidak Cukup
18.	Wonosegoro	54.734	5	7	0	Cukup
19.	Juwangi	35.057	3	4	0	Cukup
	Jumlah	951.717	83	90	87.008	

Sumber: Kabupaten Boyolali dalam Angka dan hasil penghitungan

Berdasarkan ketersediaan prasarana hasil penelitian dari sampel SMP negeri dengan akreditasi A yang diambil diketahui bahwa prasarananya sudah lengkap. SMP negeri dengan akreditasi B lengkap, sedangkan akreditasi C untuk tahun 2009 tidak ada, sedangkan untuk SMP negeri yang belum terakreditasi prasarananya sudah lengkap. Lengkap disini memiliki pengertian bahwa semua standar prasarana yang disebutkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 telah ada di SMP tersebut dan telah memenuhi kriteria. Dari sampel SMP swasta dengan akreditasi B diketahui bahwa prasarananya belum lengkap. SMP swasta dengan akreditasi C belum lengkap, dan SMP swasta belum terakreditasi prasarananya belum lengkap. Belum lengkap disini memiliki pengertian bahwa SMP tersebut belum memiliki prasarana sesuai dengan standar yang disebutkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomer 24 Tahun 2007, atau prasarananya sudah ada namun tidak memenuhi kriteria. Penyajian ketersediaan SMP di Kabupaten Boyolali disajikan melalui Peta Kecukupan SMP di Kabupaten Boyolali Tahun 2011.

### **Daya Layan Fasilitas Pendidikan di Kabupaten Boyolali Tahun 2011**

Dalam perhitungan daya layan SMP ini digunakan asumsi bahwa semua anak usia sekolah SMP bersekolah di sekolah yang ada di Kecamatan mereka masing-masing dan tidak menghiraukan faktor lain yang menjadikan anak usia SMP untuk bersekolah di SMP yang ada di Kecamatan tetangganya. Pengukuran variabel antara lain rasio jumlah sekolah/sekolah minimal, rasio ruang kelas/ruang minimal, rasio guru/ murid, dan rasio murid/ kelas. Hasil rasio tersebut kemudian diskoring untuk mengetahui daya layan tersebut apakah tinggi, cukup, atau rendah. Distribusi daya layan fasilitas pendidikan jenjang SMP di Kabupaten Boyolali sebagai berikut: (a) Kategori rendah, faktor yang mempengaruhi adalah daya layan sekolah yang belum memenuhi dilihat dari skornya yang kurang dari 1. Kecamatan yang termasuk kedalam kategori rendah meliputi: Kecamatan Banyudono, Kecamatan Sambu, Kecamatan Nogosari, Kecamatan Simo, Kecamatan Klego, dan Kecamatan Andong. (b) Kategori sedang, faktor yang mempengaruhi meliputi daya layan ruang kelas dan rasio murid per kelas yang rendah. Kecamatan yang termasuk kedalam kategori sedang meliputi: Kecamatan Ampel, Kecamatan Cepogo, Kecamatan Musuk, Kecamatan Mojosongo, Kecamatan Sawit, Kecamatan Teras, Kecamatan Ngemplak, dan Kecamatan Karanggede. (c) Kategori tinggi, faktor yang mempengaruhi meliputi daya layan sekolah yang sudah memenuhi, daya layan ruang kelas yang tinggi, rasio murid per kelas yang tinggi dan rasio murid per guru yang tinggi. Kecamatan yang termasuk kedalam kategori tinggi meliputi: Kecamatan Selo, Kecamatan Boyolali, Kecamatan Kemusu, Kecamatan Wonosegoro, dan Kecamatan Juwangi. Perbedaan daya layan fasilitas pendidikan disebabkan antara lain karena penyediaan fasilitas pendidikan pemanfaatannya berbeda antara satu kecamatan dengan kecamatan lain. Pemanfaatan fasilitas pendidikan yang optimal akan menyebabkan daya layan fasilitas pendidikan menjadi tinggi sedangkan fasilitas pendidikan yang pemanfaatannya kurang optimal maka daya layannya menjadi rendah. Penyajian daya layan SMP di Kabupaten Boyolali disajikan melalui Peta Daya Layan SMP di Kabupaten Boyolali Tahun 2011

### **PENUTUP**

Persebaran, pola, dan jangkauan SMP di Kabupaten Boyolali Tahun 2011 sebagai berikut: (a) Distribusi SMP paling banyak terdapat di Kecamatan Boyolali dengan jumlah SMP sebanyak 11.1 % dari seluruh SMP yang ada di Kabupaten Boyolali, kemudian disusul oleh Kecamatan Ampel sebesar 10% jumlah SMP paling sedikit terdapat di Kecamatan Selo sebesar 2.2%. (b) Pola persebaran SMP di Kabupaten Boyolali pada topografi bergunung adalah acak (*random*), sedangkan pola persebaran SMP pada topografi dataran rendah juga acak (*random*) (c) Jangkauan SMP di Kabupaten Boyolali sebesar 11.1%

mudah terjangkau, 81.1% cukup terjangkau, dan 7.7% SMP sulit terjangkau. Kecukupan SMP tertinggi di Kecamatan Ampel, Kecamatan Boyolali, Kecamatan Sawit, Kecamatan Banyudono, Kecamatan Sambu, Kecamatan Simo, Kecamatan Karanggede, Kecamatan Klego, Kecamatan Andong, dan Kecamatan Wonosegoro, dan kecukupan terendah di Kecamatan Cepogo. Berdasarkan penghitungan variabel daya layan beberapa kecamatan di Kabupaten Boyolali jumlah sekolahnya belum memenuhi kebutuhan meliputi: Kecamatan Selo, Kecamatan Cepogo, Kecamatan Musuk, Kecamatan Mojosongo, Kecamatan Teras, Kecamatan Ngemplak, Kecamatan Nogosari, Kecamatan Kemusu, dan Kecamatan Juwangi.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Bintarto, R dan Hadisumarmo, S. (1979). *Metode Analisa Geografi*. Jakarta: LP3ES.
- BPS Kantor Statistik Kabupaten Boyolali. (2009). *Boyolali dalam Angka 2009*. Boyolali: BPS.
- Muta'ali, L. (2000). *Teknik Analisis Regional*. Jurusan Perencanaan Pengembangan Wilayah: Fakultas Geografi UGM.
- Sugiyanto. (2004). *Analisis Medan untuk Pengembangan Lokasi Objek dan Fasilitas Pariwisata di Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar*. Tesis. Pascasarjana UGM.
- Robinson, T. (2009). *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.